

Ekonomi Biru: Profil Kekayaan Laut dan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Kepulauan Sulawesi Tenggara (2019–2023)

Blue Economy: Profile of Marine Wealth and Poverty Levels in Archipelagic Regions of Southeast Sulawesi (2019–2023)

Herie Saksono  ¹, Karina Juniarti Utami  ²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR), Mataram, Indonesia

<https://doi.org/10.46891/kainawa.6.2024.139-150>

Abstrak

Ekonomi biru menjadi paradigma penting dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan Indonesia, dengan potensi nilai mencapai USD 2,5-3 triliun pada 2030. Namun, terdapat kesenjangan antara potensi sumber daya kelautan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian terdahulu mengidentifikasi adanya "perangkap ekonomi biru" di wilayah kepulauan, tetapi belum mengeksplorasi secara komprehensif hubungan antara implementasi ekonomi biru dengan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: bagaimana pola hubungan antara potensi ekonomi biru dengan tingkat kemiskinan di daerah kepulauan, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif, penelitian menganalisis data sekunder dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2019-2023. Hasil penelitian mengungkapkan paradox di mana wilayah dengan potensi kelautan besar seperti Wakatobi justru menunjukkan PDRB rendah dan tingkat kemiskinan tinggi. Faktor utama yang mempengaruhi meliputi keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas pasar, dan kapasitas sumber daya manusia. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan framework analisis yang mengintegrasikan aspek ekonomi biru, kemiskinan, dan karakteristik wilayah kepulauan. Rekomendasi mencakup penguatan kebijakan ekonomi biru nasional, pengembangan masterplan provinsi terintegrasi, dan implementasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal di tingkat kabupaten/kota.

Kata Kunci

Ekonomi Biru; Kemiskinan; Wilayah Kepulauan; Pembangunan Berkelanjutan; Sulawesi Tenggara.

Abstract

Blue economy has become an important paradigm in sustainable development within Indonesia's archipelagic regions, with potential value reaching USD 2.5-3 trillion by 2030. However, there is a gap between marine resource potential and coastal community welfare. Previous research has identified a "blue economy trap" in archipelagic regions but has not comprehensively explored the relationship between blue economy implementation and poverty alleviation. This research poses two questions: how the relationship pattern between blue economy potential and poverty levels in archipelagic regions manifests, and what factors influence its implementation effectiveness. Using a qualitative-exploratory approach, the research analyzes secondary data from 17 districts/cities in Southeast Sulawesi Province during 2019-2023. Results reveal a paradox where regions with significant marine potential, such as Wakatobi, show low GRDP and high poverty rates. Key influencing factors include infrastructure limitations, market accessibility, and human resource capacity. The research novelty lies in developing an analytical framework integrating blue economy aspects, poverty, and archipelagic region characteristics. Recommendations include strengthening national blue economy policies, developing integrated provincial masterplans, and implementing local potential-based empowerment programs at district/city levels.

Keywords

Blue Economy; Poverty; Archipelagic Regions; Sustainable Development; Southeast Sulawesi.

Penulis korespondensi: Herie Saksono (herie.saksono26@gmail.com)

Hak cipta: © 2024 Penulis.

Karya ini dilisensikan di bawah lisensi **Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional** 

Bagaimana mengutip artikel ini: Saksono, H., & Utami, K. J. (2024). Ekonomi Biru: Profil Kekayaan Laut dan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Kepulauan Sulawesi Tenggara (2019–2023). *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 6(2), 139–150. <https://doi.org/10.46891/kainawa.6.2024.139-150>

1. Pendahuluan

Ekonomi biru menjadi paradigma penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah kepulauan. Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pertumbuhan ekonomi sambil mempertahankan keberlanjutan ekosistem (Ninawe, 2017a). Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, memiliki potensi ekonomi biru yang signifikan dengan proyeksi nilai mencapai USD 2,5-3 triliun pada 2030 (Evans et al., 2023a).

Meskipun memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah, wilayah kepulauan Indonesia menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan. Fenomena ini sering kali disebut sebagai "perangkap ekonomi biru", yaitu situasi di mana potensi kelautan yang besar tidak mampu secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Wardhani et al., 2023a). Sementara Österblom et al., (2023a) menyoroti pentingnya kesetaraan dalam distribusi manfaat ekonomi kelautan. Dalam studinya, Leotaud et al., (2020a) menunjukkan bahwa pola serupa juga terjadi di kawasan Karibia, di mana ketimpangan ekonomi antara komunitas pesisir dan non-pesisir tetap tinggi meskipun adanya inisiatif ekonomi biru.

Literatur menunjukkan bahwa tantangan ini bukan hanya persoalan aksesibilitas, tetapi juga tata kelola sumber daya yang kurang optimal. Menurut Techera & Winter (2019a) keberlanjutan ekonomi biru sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya laut yang adil dan efisien, yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta integrasi antara kebijakan lokal dan nasional. Keadaan ini selaras dengan temuan Perissi & Bardi (2021a), yang menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik untuk mengelola ekosistem laut dalam konteks pembangunan ekonomi.

Permasalahan utama terletak pada paradoks antara melimpahnya sumber daya kelautan dengan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan. Paena & Rangka (2012a) mengidentifikasi potensi besar sektor kelautan di Kabupaten Wakatobi, namun Ilma & Supriadi (2022a) menemukan bahwa potensi tersebut belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan. Karenanya, studi ini mengajukan pertanyaan: "Bagaimana eksistensi kekayaan laut sebagai potensi ekonomi biru dan tingkat kemiskinan di kepulauan Sulawesi Tenggara kurun waktu 2019-2023? Melalui studi ini ingin diketahui kesenjangan yang terjadi antara potensi ekonomi biru dan realitas kemiskinan di daerah kepulauan melalui studi kasus di daerah berciri kepulauan – Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam studi ini diacu teori besar konsep pembangunan berkelanjutan dari Ebarvia (2016) yang menghubungkan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sementara itu, teori rentang menengahnya mengadopsi pendekatan ekonomi biru dari Schottli (2018a) dan dalam teori penerapannya digunakan konsep ocean equity dari Österblom et al., (2023b). Integrasi teori-teori ini bertujuan untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif dan relevan. Pada akhirnya, State-of-the-Art yang menjadi kekuatan penelitian ini terletak pada integrasi analisis kualitatif-eksploratif dengan pendekatan tematik sebagaimana digunakan Cavallo et al., (2023a) dalam mengkaji pembangunan ekonomi kelautan. Kebaruan penelitian ini adalah pengembangan kerangka kerja (framework) analisis komprehensif yang mengintegrasikan aspek ekonomi biru, kemiskinan, dan karakteristik kewilayahannya. Dalam Upaya memahami dinamika Pembangunan kepulauan ketiga hal tersebut belum banyak dieksplorasi dan diterapkan di Nusantara, sehingga langka dan jarang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya seperti Herie (2013a), Hakim (2013), maupun Sarangi (2023a). Pada akhirnya, rekomendasi praktis menjadi kebutuhan utama keluaran penelitian ini untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui kekayaan daerah berbasis ekonomi biru.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif untuk menganalisis fenomena ekonomi biru dengan realitas kesenjangan (reality gap) yang timbul antara potensi kekayaan laut, kawasan pesisir, dan tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah berciri kepulauan. Lincoln (2002a) menekankan pentingnya pendekatan penelitian kualitatif untuk memahami kompleksitas dinamika sosial-ekonomi dalam konteks ini. Penetapan pendekatan kualitatif didasari pertimbangan karena lebih mampu memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas hubungan antara sumber daya kelautan dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Evans et al., 2023b). Pemilihan studi eksploratif karena urgensi pengungkapan berbagai faktor yang berperan strategis bagi implementasi ekonomi biru di wilayah kepulauan. Studi ini berupaya mengeksplorasi dan mengungkap profil kekayaan laut dan tingkat kemiskinan dalam perspektif ekonomi biru. Hal ini sesuai saran Mann (2015a) bahwa analisis yang berbasis pada data empiris dan pendekatan tematik dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang di wilayah kepulauan. Selain itu, menurut Lincoln (2002b), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, termasuk dalam konteks hubungan antara potensi ekonomi biru dan pengentasan kemiskinan.

Memerhatikan karakteristik wilayahnya yang representatif sebagai daerah kepulauan, maka Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan menjadi locus studi. Dipilihnya Provinsi Sulawesi Tenggara karena karakteristik kewilayahannya merepresentasikan daerah pesisir, pulau-pulau kecil (PPK), laut, dan kepulauan dengan potensi kelautan yang besar. Pemilihan lokasi ini juga didukung temuan Leotaud et al., (2020b) yang menyoroti pentingnya kajian ekonomi biru di kawasan dengan dinamika sosial-ekonomi pesisir yang serupa. Hal ini selaras pula dengan temuan Paena & Rangka (2012b) yang mengidentifikasi potensi besar sektor kelautan, khususnya di Kabupaten Wakatobi. Penggunaan metode eksploratif diharapkan mampu mengungkap faktor-faktor strategis-kompetitif yang memengaruhi implementasi ekonomi biru, sebagaimana disarankan Techera & Winter (2019b).

Paradoks antara kekayaan laut dan kemiskinan di wilayah kepulauan turut mencerminkan kesenjangan penelitian yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada potensi ekonomi biru secara umum, tanpa menggali hubungan spesifik antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan pengentasan kemiskinan di wilayah kepulauan Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kebutuhan data sekunder diperoleh melalui studi literatur secara komprehensif terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, termasuk laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan data statistik. terutama yang berfokus pada implementasi ekonomi biru di Indonesia, khususnya di daerah berciri kepulauan.

Analisis data mengadopsi pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur tentang pengembangan ekonomi kelautan (Cavallo et al., 2023b). Proses analisis melibatkan langkah-langkah pengumpulan data, identifikasi tema utama yang mencakup aspek potensi sumber daya, tantangan, dan strategi implementasi. Triangulasi data, dan penyusunan kerangka kerja hasil analisis tematik yang menghubungkan ekonomi biru, kemiskinan, dan karakteristik wilayah kepulauan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi berbagai dimensi ekonomi biru, mulai dari potensi sumber daya kelautan hingga tantangan dalam

implementasinya. Analisis juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial sebagaimana digarisbawahi dalam konsep ocean equity (Österblom et al., 2023c).

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep "Ekonomi Biru" di Sulawesi Tenggara menyoroti potensi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, disandingkan dengan tingkat kemiskinan yang terus-menerus di daerah tertentu. Pendekatan ini bertujuan memanfaatkan sumber daya laut untuk meningkatkan mata pencaharian sambil memastikan keseimbangan ekologis. Hubungan antara kekayaan laut dan tingkat kemiskinan di wilayah berbasis pulau, khususnya dalam konteks Ekonomi Biru, mengungkapkan interaksi yang kompleks antara potensi dan tantangan. Hasil penelitian menemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi ekonomi biru dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, dari 17 kabupaten/kota yang diteliti, terdapat variasi yang mencolok dalam pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, meskipun sebagian besar wilayah memiliki karakteristik kepulauan dengan potensi kelautan yang besar. Temuan ini memperkuat argumentasi Wardhani et al., (2023b) tentang adanya "perangkap ekonomi biru" di wilayah kepulauan Indonesia, di mana kekayaan sumber daya kelautan tidak secara otomatis mentransformasi kesejahteraan masyarakat lokal.

Data empiris menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah pulau yang signifikan justru mengalami pertumbuhan negatif pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Evans et al., (2023c) yang mengidentifikasi adanya tantangan struktural dalam mengoptimalkan manfaat ekonomi biru bagi masyarakat pesisir. Lebih lanjut, sebagaimana digarisbawahi Österblom et al., (2023d), distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata menjadi faktor kunci yang menghambat efektivitas implementasi ekonomi biru dalam pengentasan kemiskinan.

Analisis terhadap data Tabel 1 juga mengungkapkan paradoks menarik, di mana beberapa wilayah dengan PDRB sektor kelautan yang tinggi justru memiliki persentase penduduk miskin yang signifikan. Kondisi ini merefleksikan argumentasi Ilma & Supriadi (2022b) tentang urgensi strategi "blue recovery" yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan. Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut tentang efektivitas implementasi ekonomi biru dalam konteks pengentasan kemiskinan di wilayah kepulauan.

Berikut akan diuraikan secara rinci hasil analisis terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi, pola kemiskinan, dan tantangan implementasi ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan mengacu pada data empiris dalam Tabel 1 serta didukung oleh berbagai studi terdahulu yang relevan.

Tabel 1. Perkembangan Penduduk dan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023

No.	Kab./Kota	Jumlah Pulau	Laju Pertumbuhan (CAGR) 2019-2023				
			Penduduk			PDRB ADHK 2010	
			Jumlah Penduduk (%)	Penduduk Miskin (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan (Rp. Miliar)	Laju Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)
1.	Buton	46	4,03	0,32	0,22	4,24	(23,57)
2.	Muna	198	0,07	3,16	2,29	3,55	(9,96)

No.	Kab./Kota	Jumlah Pulau	Laju Pertumbuhan (CAGR) 2019-2023				
			Penduduk			PDRB ADHK 2010	
			Jumlah Penduduk (%)	Penduduk Miskin (%)	Percentase Penduduk Miskin (%)	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan (Rp. Miliar)	Laju Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)
3.	Konawe	7	1,42	1,44	1,35	0,80	(24,02)
4.	Kolaka	14	(1,54)	8,25	(0,25)	5,32	(13,97)
5.	Konawe Selatan	28	0,71	2,11	1,02	3,78	0,56
6.	Bombana	26	(3,79)	1,45	0,40	5,75	4,39
7.	Wakatobi	142	4,98	2,06	0,10	5,99	4,28
8.	Kolaka Utara	12	(0,87)	2,42	0,71	1,49	(25,53)
9.	Buton Utara	31	1,85	(0,25)	(0,56)	3,21	(9,20)
10.	Konawe Utara	70	3,15	0,97	(0,33)	2,18	(53,20)
11.	Kolaka Timur	-	(1,45)	(6,13)	0,60	1,97	(44,94)
12.	Konawe Kepulauan	2	3,32	(1,84)	(1,92)	1,60	(13,38)
13.	Muna Barat	1	2,27	0,62	0,34	4,58	(2,16)
14.	Buton Tengah	4	6,43	(0,31)	(0,54)	2,71	0,09
15.	Buton Selatan	-	5,37	0,15	0,17	5,95	2,10
16.	Kota Kendari	1	(1,87)	2,69	0,83	4,89	10,28
17.	Kota Baubau	5	(0,83)	1,71	0,88	5,00	(2,47)
	Sulawesi Tenggara	590	0,41	1,53	0,42	3,53	(3,10)

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau – Tertanggal 09 November 2022); Dokumen Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. BPS; dan <https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/provinsi-dengan-jumlah-pulau-terbanyak-di-indonesia>; <https://indonesiabaik.id/infografis/17001-pulau-di-indonesia-tersebar-di-mana-saja>. Data Diolah. 2024.

Berdasarkan analisis terhadap Tabel 1 yang menyajikan data perkembangan penduduk dan PDRB ADHK 2010 di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2019-2023, terlihat adanya paradoks antara potensi ekonomi biru dengan realitas kemiskinan di wilayah kepulauan. Hal ini sejalan dengan argumentasi Wardhani et al., (2023c) tentang adanya "perangkap ekonomi biru" di wilayah kepulauan Indonesia, di mana potensi sumber daya kelautan yang besar tidak serta merta mentransformasi kesejahteraan masyarakat lokal. Data memperlihatkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang beragam di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara. Dalam periode 2019-2023, Kota Kendari konsisten menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan PDRB tertinggi. Keadaan ini mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan.

Diagnosis terhadap data menunjukkan bahwa dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat kesenjangan pertumbuhan yang signifikan. Kabupaten Wakatobi yang memiliki 142 pulau dengan potensi kelautan besar sebagaimana diidentifikasi Paena & Rangka (2012c), justru menunjukkan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang relatif rendah (5,99 miliar rupiah) dengan laju pertumbuhan 4,28%. Kondisi ini mengonfirmasi temuan Ilma & Supriadi (2022c) tentang perlunya strategi "blue recovery" untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Analisis kritis terhadap data pertumbuhan menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan karakteristik kepulauan seperti Konawe Kepulauan (2 pulau), Buton (46 pulau), dan Muna (198 pulau) memiliki laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang negatif, masing-masing -13,38%, -23,57%, dan -9,96%. Fenomena ini merefleksikan

apa yang disebut Evans et al., (2023d) sebagai tantangan dalam memastikan manfaat ekonomi biru dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir. Pola pertumbuhan PDRB yang bervariasi antardaerah menggambarkan kompleksitas implementasi ekonomi biru di wilayah kepulauan. Kabupaten Wakatobi, meskipun memiliki potensi kelautan yang besar sebagaimana diidentifikasi oleh Paena & Rangka (2012d), menunjukkan PDRB yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya dan realisasi ekonomi, yang menurut Ilma & Supriadi (2022d) memerlukan strategi "blue recovery" untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Data pertumbuhan penduduk menunjukkan tren positif di sebagian besar wilayah, namun tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan PDRB. Situasi ini merefleksikan apa yang disebut Evans et al., (2023d) sebagai tantangan dalam memastikan manfaat ekonomi biru dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir. Österblom et al., (2023e) menekankan pentingnya pendekatan "ocean equity" untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih merata. Sintesis data mengungkapkan bahwa persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Kolaka (8,25%) yang justru memiliki PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cukup tinggi (5,32 miliar rupiah). Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam distribusi manfaat ekonomi, sejalan dengan konsep "ocean equity" yang dikemukakan Österblom et al., (2023f) tentang pentingnya memastikan distribusi manfaat yang lebih merata dari sumber daya kelautan.

Temuan ini memperkuat argumentasi Herie (2013b) bahwa pengembangan ekonomi biru di daerah kepulauan membutuhkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan karakteristik lokal. Lebih lanjut, sebagaimana ditekankan Sarangi (2023b), diperlukan tata kelola dan valuasi ekonomi sumber daya pesisir yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di wilayah kepulauan. Pola pertumbuhan yang tidak merata ini menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Tenggara masih menghadapi tantangan struktural dalam mentransformasi potensi kelautan menjadi kesejahteraan masyarakat. Hal ini membutuhkan strategi pengembangan yang lebih terintegrasi dan berkeadilan sebagaimana diargumentasikan dalam berbagai studi terdahulu.

3.1. Potensi Ekonomi Biru di Wilayah Kepulauan

Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai wilayah kepulauan, memiliki potensi ekonomi biru yang sangat besar. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi biru yang dikemukakan oleh Ninawe (2017b), yang mendefinisikan ekonomi biru sebagai aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan laut dan menghasilkan output berupa barang dan jasa. Potensi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perikanan tangkap, budidaya laut, hingga pariwisata bahari. Studi Paena & Rangka (2012e) di Kabupaten Wakatobi menunjukkan adanya potensi besar untuk pengembangan budidaya rumput laut, yang merupakan salah satu implementasi konsep ekonomi biru. Potensi ini sejalan dengan visi ekonomi biru sebagaimana dikemukakan Schottli (2018b) mengenai pentingnya inovasi dan kewirausahaan dalam mentransformasi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Hampir seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, khususnya perikanan dan akuakultura (Ilma & Supriadi, 2022e; Shifa et al., 2024a). Selain itu, mendorong penciptaan peluang pekerjaan terutama dalam perikanan berkelanjutan dan pariwisata laut, yang sangat penting

bagi masyarakat lokal (Butarbutar et al., 2024; Ilma & Supriadi, 2022f). Studi Evans et al., (2023e) bahwa Ekonomi Biru dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi perkiraan nilai mencapai USD 2,5—3 triliun pada tahun 2030.

Bagi wilayah berciri kepulauan, Ekonomi Biru dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi, terutama di wilayah pesisir dan PPK. Ini menawarkan peluang untuk industri baru dan praktik berkelanjutan yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan kemakmuran (Ilma & Supriadi, 2022g). Ekonomi Biru juga sejalan dengan SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya SDG 14, yang berfokus pada konservasi dan penggunaan sumber daya lautan, laut, dan kelautan (Borges, 2021a; Sarangi, 2023c) Melalui Ekonomi Biru, tercipta peluang sektoral, di mana sektor-sektor utama seperti perikanan, pariwisata laut, dan akuakultur menjadi pusat Ekonomi Biru yang memberikan lapangan kerja dan peluang pendapatan bagi komunitas pesisir (Wardhani et al., 2023d).

3.2. Paradoks Kemiskinan di Tengah Kelimpahan

Meskipun memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, daerah kepulauan masih menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Wardhani et al., (2023e) yang mengidentifikasi adanya "perangkap ekonomi biru" di wilayah kepulauan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam yang melimpah tidak serta merta mentransformasi kesejahteraan masyarakat lokal. Herie (2013c) dalam penelitiannya menggarisbawahi bahwa pengembangan ekonomi biru di daerah kepulauan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini diperkuat oleh studi Hakim (2013b) yang menekankan pentingnya pengembangan ekonomi pesisir berbasis kelautan dan perikanan yang memperhatikan aspek keberlanjutan.

Tantangan dan Tingkat kemiskinan tidak serta merta tereduksi oleh melimpahnya sumber daya kelautan dan perikanan dalam konteks ekonomi biru. Sebab, meskipun ada potensi, banyak daerah berjuang dengan praktik yang tidak berkelanjutan, yang menyebabkan degradasi ekologis dan kerawanan pangan, seperti yang ditunjukkan oleh peringkat rendah Indonesia dalam Indeks Kesehatan Lautan (Aprilia & Mulyanie, 2023a) lain, kesenjangan ekonomi tampak nyata di daerah berciri kepulauan. Tingkat kemiskinan yang tinggi tetap ada di masyarakat pesisir karena infrastruktur dan akses ke pasar yang tidak memadai, membatasi manfaat dari inisiatif ekonomi biru (Shifa et al., 2024b). Sebaliknya, sementara ekonomi biru menghadirkan peluang untuk menghasilkan kekayaan, tantangan tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan kesenjangan sosial ekonomi harus ditangani untuk memastikan manfaat yang adil bagi semua komunitas pesisir.

Hambatan utama termasuk infrastruktur yang tidak memadai, sumber daya keuangan yang terbatas, dan dukungan pemerintah yang tidak mencukupi, justru yang menjadi penghambat pemanfaatan kekayaan kelautan (Wardhani et al., 2023f). Disisi lain, akses yang tidak adil terhadap manfaat laut memperburuk kemiskinan, karena kepentingan yang kuat sering mendominasi distribusi sumber daya. Seringkali ditemui adanya tantangan dalam mewujudkan kemanfaatan ekonomi biru. Karenanya, Tata kelola dan infrastruktur yang efektif sangat penting untuk memanfaatkan potensi Ekonomi Biru. Di daerah seperti Pulau Lombok, infrastruktur dan tata kelola yang tidak memadai telah menghambat penerjemahan kekayaan laut ke dalam pengentasan kemiskinan (Wardhani et al., 2023g).

Dalam konteks manajemen sumber daya, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan sangat penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan manfaat jangka panjang. Ini termasuk mengatasi masalah seperti polusi dan konservasi keanekaragaman hayati (Borges, 2021b). Penilaian ekonomi yang tepat dari sumber daya pesisir diperlukan untuk mengembangkan strategi yang menguntungkan masyarakat lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Sarangi, 2023d). Terlepas dari aspek ekonomi biru yang menjanjikan, masih ditemui adanya hambatan signifikan untuk keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan di wilayah kepulauan. Ini termasuk kebutuhan untuk perbaikan tata kelola, infrastruktur, dan manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Ekonomi Biru dapat secara efektif berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

3.3. Strategi Pengembangan Ekonomi Biru untuk Pengentasan Kemiskinan

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, implementasi ekonomi biru memerlukan strategi yang holistik. Ayhan (2023) menekankan pentingnya sektor maritim dalam pengurangan kemiskinan, sementara Sarangi (2023e) menggarisbawahi pentingnya tata kelola dan valuasi ekonomi sumber daya pesisir untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Aprilia & Mulyanie (2023) mengemukakan bahwa implementasi konsep ekonomi biru di Indonesia harus sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 14 tentang kehidupan bawah laut. Hal ini diperkuat oleh Alifa & Zahidi (2024) yang menyoroti ekonomi biru sebagai strategi Indonesia menuju ekonomi maju.

Dalam Upaya optimasi potensi ekonomi biru untuk pengentasan kemiskinan, diperlukan strategi perbaikan yang menekankan perikanan skala kecil dan ekowisata agar dapat meningkatkan manfaat masyarakat sambil mempromosikan keberlanjutan (Evans et al., 2023f). Selain itu, fokus pada tata kelola inklusif dan distribusi sumber daya yang adil sangat penting untuk mewujudkan potensi Ekonomi Biru. Sebaliknya, sementara Ekonomi Biru menghadirkan peluang untuk pertumbuhan, ia juga berisiko melanggengkan ketidaksetaraan yang ada jika tidak dikelola secara inklusif. Tantangannya terletak pada memastikan bahwa kekayaan laut diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi semua anggota masyarakat, daripada memperkuat status quo ketidakadilan.

Ekonomi Biru merupakan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir, laut, PPK, dan kepulauan, memanfaatkan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, hubungan antara kekayaan laut dan tingkat kemiskinan di daerah-daerah ini kompleks dan beragam. Sementara Ekonomi Biru memiliki potensi untuk meningkatkan mata pencaharian dan kondisi ekonomi, beberapa tantangan dan faktor mempengaruhi efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan.

Hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi ekonomi biru dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari 17 kabupaten/kota yang diteliti, beberapa wilayah menunjukkan pola yang mencerminkan "perangkap ekonomi biru," yaitu kekayaan sumber daya kelautan yang besar tidak secara otomatis mengurangi tingkat kemiskinan. Data ini mendukung temuan Leotaud et al., (2020c), yang mengidentifikasi pola serupa di wilayah Karibia.

Sebagai contoh, Kabupaten Wakatobi dengan 142 pulau menunjukkan PDRB yang relatif rendah meskipun memiliki potensi kelautan yang besar. Hal ini mencerminkan pentingnya tata kelola sumber daya laut yang inklusif dan adil, sebagaimana diargumentasikan oleh Techera & Winter (2019c). Tantangan ini diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur dan

akses pasar, yang membatasi kemampuan masyarakat lokal untuk memanfaatkan potensi kelautan (Perissi & Bardi, 2021b).

Analisis terhadap data PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten/kota. Sebagai contoh, Kabupaten Konawe Kepulauan mencatat pertumbuhan negatif di sektor ini, yang menunjukkan kurangnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Menurut Lincoln (2002c), pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami faktor-faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhi fenomena ini.

Fenomena ini juga mencerminkan kurangnya integrasi antara kebijakan lokal dan nasional dalam implementasi ekonomi biru. Sebagaimana dijelaskan oleh Mann (2015b), koordinasi lintas sektor dan perencanaan yang berbasis data menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Pendekatan tematik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur maritim, kapasitas sumber daya manusia, dan distribusi manfaat ekonomi merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas ekonomi biru di wilayah kepulauan. Hasil analisis ini menekankan perlunya strategi pembangunan ekonomi biru yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Sebagaimana disarankan oleh Baker, Lynda (2016), kebijakan berbasis

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebagai representasi wilayah berciri kepulauan di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara masih dihadapkan pada kesenjangan antara melimpahnya potensi ekonomi biru dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang besar, tantangan kemiskinan masih menjadi isu utama yang perlu diatasi.

Pengembangan ekonomi biru perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial. Implementasi strategi ekonomi biru yang efektif memerlukan pendekatan terintegrasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat pesisir sebagai aktor utama pembangunan. Penelitian ini mengungkapkan temuan penting yang mendeskripsikan profil kekayaan sumber daya kelautan dan tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi sumber daya kelautan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari variasi PDRB dan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka kerja analisis yang mengintegrasikan aspek ekonomi biru, kemiskinan, dan karakteristik wilayah kepulauan dalam konteks Sulawesi Tenggara. Hal ini menawarkan perspektif baru dalam memahami dinamika pembangunan wilayah kepulauan.

Direkomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk: 1) mengembangkan kebijakan ekonomi biru nasional yang mengakomodasi kekhususan daerah kepulauan; 2) memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dalam upaya implementasi program ekonomi biru, terutama dalam aspek infrastruktur, pendidikan, dan pengembangan teknologi kelautan; dan 3) mengalokasikan anggaran khusus (Dana Ekonomi Biru) yang diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur maritim di wilayah kepulauan.

Selanjutnya, direkomendasikan juga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk: 1) mengembangkan Rencana Induk Ekonomi Biru Provinsi Kepulauan yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing kabupaten/kota; 2) memperkuat sistem tata kelola Ekonomi Biru yang difokuskan pada

optimasi kemanfaatan potensi kelautan dan perikanan berbasis kearifan lokal; 3) membangun Hub Inovasi Ekonomi Biru dengan mengembangkan teknologi kelautan tingkat provinsi; dan 4) mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan pendampingan teknis.

Secara praktis, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berciri Kepulauan disarankan untuk: 1) mengembangkan program ekonomi biru berbasis potensi lokal; 2) memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir melalui koperasi dan UMKM berbasis kelautan; 3) membangun sistem informasi terpadu untuk monitoring potensi dan pemanfaatan sumber daya kelautan; 4) mengoptimalkan kerja sama antardaerah dalam pengembangan ekonomi biru, terutama untuk wilayah yang berbatasan langsung; dan 5) mengembangkan program pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan nilai tambah produk kelautan.

Ucapan Terima Kasih

Apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada Penjabat (Pj.) Wali Kota Baubau, Bapak Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., M.Si. dan kepada Bapak Drs. Rahmat Tuta, M.Si., selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Baubau beserta jajarannya dan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Baubau yang sangat kooperatif dan berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pendalaman, diskusi, menggali ide/gagasan, dan berbagi pemikiran dalam penguatan agenda kelitbangda di Kota Baubau 2024, sehingga sangat dirasakan kemanfaatannya untuk memperkaya khazanah penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah melalui publikasi artikel ilmiah ini.

Referensi

- Alifa, N. N., & Zahidi, M. S. (2024). Pengembangan Ekonomi Biru Sebagai Strategi Indonesia Menuju Ekonomi Maju. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 38(1), 48–65. <https://doi.org/10.52318/jisip.2024.v38.1.4>
- Aprilia, & Mulyanie, E. (2023). Implementasi Konsep Blue Economy di Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 14: Life Below Water. *Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika*, 7(2), 40–48. <https://doi.org/10.33059/jisa.v7i2.9116>
- AYHAN, E. E. (2023). From Ports to Prosperity: Leveraging Maritime Sector for Poverty Reduction. *Journal of Marine and Engineering Technology*, 3(2), 99–109. <https://doi.org/10.58771/joinmet.1402658>
- Baker, Lynda, M. (2016). Observation: A complex research method. *Library Trends*, 55(1), 171–189. <https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/3659/ResearchProcess.pdf?sequence=2>
- Borges, T. C. (2021). Principais preocupações da economia azul: uma perspetiva biológica e ambiental. 29–46.
- Butarbutar, A. R., Suharyanto, D., Novaria, R., & Munizu, M. (2024). Comparative Study Of Village Officials In Increasing Tourism Literacy And Creating Tourism Villages. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(2), 20–25. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i2.750>
- Cavallo, M., Bugeja Said, A., & Pérez Agúndez, J. A. (2023). Who is in and who is out in ocean economies development? *Sustainability*, 15(4), 3253.
- Ebarvia, M. C. M. (2016). Economic assessment of oceans for sustainable blue economy development. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, 2(2), 7.
- Evans, L. S., Buchan, P. M., Fortnam, M., Honig, M., & Heaps, L. (2023). Corrigendum: Putting coastal communities at the center of a sustainable blue economy: A review of risks, opportunities, and strategies (Frontiers in Political Science, (2023), 4, (1032204), 10.3389/fpos.2022.1032204). *Frontiers in Political Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1182415>
- Hakim, M. F. (2013). Blue economy daerah pesisir berbasis kelautan dan perikanan. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 1–7.
- Herie, S. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Umum Dan Kependudukan Badan*
- Ilma, A., & Supriadi, D. (2022). Blue Economy: Solusi Membangun Kembali Perekonomian "Blue Recovery" Pasca Pandemi Covid-19 untuk Sustainable Welfare. *Lingka Ekonomika*, 1(1), 87–96. <https://doi.org/10.32424/jle.v1i1.6516>
- Leotaud, N., Girvan, A., & Jattansingh, S. (2020). The Blue Economy winners and losers in the Wider Caribbean (pp. 21–34). <https://doi.org/10.4324/9780429342233-3>

- Lincoln, Y. S. (2002). Insights into library services and users from qualitative research. *Library and Information Science Research*, 24(1), 3–16. [https://doi.org/10.1016/S0740-8188\(01\)00107-4](https://doi.org/10.1016/S0740-8188(01)00107-4)
- Mann, T. (2015). *The Oxford guide to library research*. Oxford University Press.
- Ninawe, A. (2017). Blue Economy is the Economic Activities that Directly or Indirectly Take Place in the Ocean and Seas, Use Outputs, Goods and Services into Ocean and Land Based Activities. Examines in *Marine Biology & Oceanography*, 1(1), 500–502. <https://doi.org/10.31031/eimbo.2017.01.0000501>
- Österblom, H., Wabnitz, C. C. C., Tladi, D., Allison, E. H., Arnaud-Haond, S., Bebbington, J., Bennett, N., Blasiak, R., Boonstra, W., & Choudhury, A. (2023). Towards ocean equity. In *The Blue Compendium: From Knowledge to Action for a Sustainable Ocean Economy* (pp. 485–521). Springer.
- Paena, M., & Rangka, N. A. (2012). Potensi dan Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut (Kappaphycus alvarezii) Di Sekitar Perairan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara
<i>[Potential And Suitability Of Land Seaweed Farming (Kappaphycus alvarezii) Water Around The District Wakatobi Southeast Sulawesi]</i>. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, 4(2), 151–159. <https://doi.org/10.20473/jipk.v4i2.11566>
- Perissi, I., & Bardi, U. (2021). *The empty sea: The future of the blue economy*. Springer Nature.
- Sarangi, U. (2023). Blue Economy Coastal Resources: Economic Valuation and Governance for Achieving Sustainable Development Goals. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.15351/2373-8456.1132>
- Schottli, J. (2018). The blue economy 3.0: the marriage of science, innovation and entrepreneurship creates a new business model that transforms society. *Journal of the Indian Ocean Region*, 14, 1–2. <https://doi.org/10.1080/19480881.2018.1429865>
- Shifa, M., Suhendra, N., Hartini, & Hatmawan, A. A. (2024). Retraksi: Analysis of the Potential of Coastal Villages Based on Blue Economy in Realizing Sustainable Development Goals. *Journal of Economics, Business and Management Issues*, 1(3), 183–196. <https://doi.org/10.47134/jebmi.v2i2.201>
- Techera, E., & Winter, G. (2019). *Marine extremes: ocean safety, marine health and the blue economy*. Routledge.
- Wardhani, B., Dugis, V., Santoso, Y. W., Mubah, A. S., Yu, Y.-W., & Pratamasari, A. (2023). e Trap of the Blue Economy: Evidence from Lombok Island, Indonesia. *Journal of Marine and Island Cultures*, 12(3), 224–239.